

2.15.000038

## Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

Ewalidata

Kode	2.15.000038
Produsen Data	DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	PERHUBUNGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Unit
Tgl. Input Data	15 August 2024
Tgl. Diperbaharui	15 August 2024

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Konsep

Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

#### Klasifikasi

Kabupaten

#### Definisi

kewenangan pemerintah kabupaten atau kota untuk mengelola dan mengawasi sektor pelayaran rakyat di tingkat daerah. Pelayaran rakyat mencakup angkutan laut yang melayani rute-rute lokal dan melibatkan kapal-kapal kecil yang beroperasi di perairan lokal. dapat meningkatkan kualitas layanan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal, dan memastikan keselamatan serta kepatuhan dalam sektor pelayaran rakyat.

#### Cara Interpretasi

semakin tinggi Angkutan Laut Pelayaran Rakyat memperlancar perdagangan, meningkatkan mobilitas, dan memperkuat persatuan

#### Metode Pengumpulan

Penjumlahan

#### Ukuran / Rumus

Jumlah

#### Catatan Lainnya

1

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	—	—	—	—	—	—	—